

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI
PENGEMBANGAN KLASTER IKAN
(Studi pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Ali Imron



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGEMBANGAN KLASTER IKAN

(Studi pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung)

Oleh
Ali Imron

Pulau pasaran memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil ikan teri terbesar di Provinsi Lampung. Potensi tersebut belum terkelola dengan baik terutama dalam mengorganisasi para pengolah ikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pemberdayaan masyarakat pesisir dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran belum maksimal karena tidak ada upaya yang bersifat pemeliharaan klaster ikan di Pulau Pasaran untuk selanjutnya. Adanya faktor yang menjadi kendala yaitu, sulitnya merubah pola pikir dan paradigma komunitas sasaran, Adanya keterbatasan dana, dan Tingkat pendidikan rendah

Adapun yang menjadi saran dalam pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu sosialisasi secara rutin, meningkatkan pelatihan, pendampingan dan pemberian motivasi kepada kelompok masyarakat, peningkatan alokasi anggaran, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat pesisir.

Kata kunci : pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan klaster ikan.

ABSTRAK

EMPOWERMENT COASTAL COMMUNITIES CLUSTER THROUGH THE DEVELOPMENT OF FISH (A Study Of The Pasaran island City Lampung)

By:
Ali Imron

Pasaran island have the potential high economics and widely known also as one of the areas producer anchovies largest in the province of Lampung. The reality can't managed well especially in organize the fish processing. Research purposes was how empowerment the coastal communities and obstacles faced in empowering the coastal communities through the development of cluster fish. This research using type research descriptive qualitative.

The result of this research showed that empowerment the community through cluster development fish on the Pasaran Island not maximum because not the efforts that in the nature of cluster maintenance of fish on the Pasaran Island for later. The factors becomes an obstacle, the difficulty of change the paradigm think and a community objective, that the lack of funds, low education level.

As for who became advice empowerment the coastal communities that is socialization routinely, increase training, assistance and the provision of motivation to community groups, increased allocations budget, improved knowledge and ability the coastal communities.

Keywords: empowerment coastal communities , cluster development fish

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI
PENGEMBANGAN KLASTER IKAN
(Studi pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Ali Imron

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

pada

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

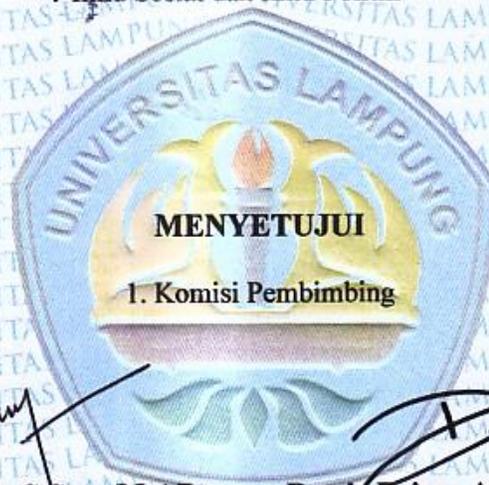
**Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
MELALUI PENGEMBANGAN KLASTER IKAN
(Studi pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa : Afi Amron

No. Pokok Mahasiswa : 1016041003

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP 19780923 200312 1001

Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP 19824212 200801 2 017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.

Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.

Penguji Utama : Dra. Dian Kagungan, M.H.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19800803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Mei 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 05 Mei 2017

Yang membuat pernyataan,



Ali Imron

NPM 1016041003

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 18 Juni 1992, anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak H. Almizar Alwin dan Ibu Hj. Surmayeni. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Talang Teluk Betung pada tahun 2004, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP N 3 Bandar Lampung pada tahun 2007, dan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung pada tahun 2010.

Tahun 2010, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus pada tahun 2013. Selama perkuliahan penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Pada tahun 2011 penulis menjadi anggota Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) HIMAGARA FISIP UNILA. Pada tahun 2012 penulis dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Sekretaris Bidang Data dan Informasi HIMAGARA FISIP UNILA periode 2012/2013. Penulis pernah berkontribusi dan menjadi bagian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). Penulis juga tercatat sebagai Anggota Rang Mudo Minang (RMM) Lampung.

Penulis tercatat juga untuk mengemban amanah menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pemuda Pelajar Sulit Air (DPC IPPSA) Teluk Betung periode 2016-2018.

Riwayat hidup ini hanyalah sepenggal dari perjalanan yang utuh, kebahagiaan tiada terkira jika penulis dianugerahi umur yang panjang serta kesehatan jasmani dan rohani untuk melanjutkan kisah dan perjuangan hidup dalam dunia pendidikan, khususnya jurusan tercinta Administrasi Negara serta bisa bercermin dari perjalanan hidup sebelumnya agar bisa menjadi lebih baik lagi.

Berbagai pengalaman organisasi selama menjadi mahasiswa ikut menginspirasi, memberi pengalaman dari spirit penulis. Tumbuh dan besar dilingkungan yang hangat dengan kasih sayang dan cinta dari keluarga, saudara, serta teman-teman membuat penulis termotivasi untuk membahagiakan orang-orang disekeliling penulis.

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al Insyirah: 6-8)

“Jangan lihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan lihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah kondisi sekitar dengan penuh kesadaran”

(J. Thurber)

“Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang anda punya, anda adalah bosnya”

(Bob Sadino)

“Lakukan apa yang kamu suka, tetap konsisten, dan sukses akan datang menghampiri”

(Ali Imron)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat “

(Surat Al Faatihah 1-7)

***Dengan mengucap rasa syukur kepada ALLAH SWT
Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:***

“ Ayahku H. Almizar Alwin dan Ibuku Hj. Surmayeni “

Perjuangan kalian mulai dari membesarkanku, menjagaku, mendidikku, memberiku segala hal yang aku butuhkan, hingga aku mencapai cita-citaku. Terima kasih banyak untuk bapak dan ibu atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dukungan, dan doa yang tiada henti untuk keberhasilanku serta senantiasa memberikan semangat yang tak pernah lelah.

***“ Uniku Lindra Veni, Amd Kep, dan Adikku Nursamsi Yulia serta
Kakak Iparku Nova Rionaldi, Amd “***

Kehadiran kalian selalu memberikan kebahagiaan dalam kehidupanku. Semoga kita selalu menjadi kebanggaan orang tua. Terimakasih untuk segalanya.

“ Segenap Keluarga Besaraku “

Terimakasih selalu memberikan do'a dan dukungan kepadaku yang tak henti-hentinya.

“ Teman Seperjuangan Ilmu Administrasi Negara “

Terimakasih selalu memberikan canda-tawa, suka-ria, sedih-duka, dan ceria-bahagia di dalam perjalanan hidupku yang akan selalu terkenang. Semangat kita pasti sukses bareng.

“ Para Pendidik dan Almamater Universitas Lampung “

Terimakasih selalu memberikan bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah jauh lebih baik ke depan.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat serta nikmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan (Studi Pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung) sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak sekali tantangan dan hambatan yang dihadapi. Penulis juga menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Segala dorongan dan motivasi yang penulis dapatkan dari berbagai pihak telah mampu memberikan rasa semangat kepada diri penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menjalani studi dan penyusunan skripsi yakni:

1. Bapak Eko Budi Sulisyo, S.Sos, M.AP, selaku dosen pembimbing utama.

Terimakasih atas masukan, nasihat, bimbingan dan kesabarannya selama penyusunan skripsi

2. Ibu Dewie Brima Atika, S.I.P, M.Si selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terimakasih atas segala motivasi dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku dosen pembahas dan dosen penguji utama yang telah memberikan kritik dan saran serta arahnya kepada penulis dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih banyak atas arahan dan dukungannya serta pengetahuan dan pemahaman yang telah diberikan yang membuat penulis ingin selalu berkembang.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku ketua jurusan ilmu administrasi negara. Terimakasih atas segala arahan dan masukan yang telah diberikan.
5. Bapak. Prof. Yulianto, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan masukannya untuk penulis.
6. Seluruh Pengajar Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Pak Simon, Pak Bambang, Bu Rahayu, Pak Noverman, Bu Novita, Pak Nana, Pak Syamsul, Bu Meiliyana, Bu Devi, Bu Intan, Bu Selvi, Bu Ita, Pak Izul) yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
7. Ibu Nur selaku Staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang ramah, dan selalu memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu kelancaran administrasi selama penulis menjadi mahasiswa dan memberikan pelayanan yang baik.
10. Terimakasih kepada Bapak Andi Dinata serta seluruh staf dan karyawan Bank Indonesia perwakilan Provinsi Lampung atas data dan informasi yang diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Ibu Ismalia serta seluruh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung atas data dan informasi yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Bapak Rosidin dan seluruh masyarakat Pulau Pasaran
13. Kedua Orang Tuaku Bapak H. Almizar Alwin dan Ibu Hj. Surmayeni yang telah memberikan motivasi, pengorbanan, semangat yang luar biasa kepadaku hingga bisa menjadi seperti ini.. Semoga ini menjadi tahapan yang indah bagi penulis untuk dapat membahagiakan Bapak dan Ibu dikemudian hari. Semoga dengan keimanan untuk terus berikhtiar, kerja keras untuk terus berupaya, tawakkal untuk berserah diri kepada Allah S.W.T, serta doa dan dukungan dari bapak dan ibu yang menjadikan penulis mendapatkan kesuksesan dalam rencana hidupnya. Terimakasih untuk segalanya yang telah diberikan, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat dan rahmat yang begitu indah disetiap waktu-Nya. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal'alamin.
14. Uniku Lindra Yeni, A.md. Kep dan Adikku Nursamsi Yulia serta Kakak Ipar Nova Rionaldi, A.md. Terimakasih untuk segala yang telah diberikan

15. Keponakanku A. Rafello Aqliyansyah dan Annisa Syofia Aqlia. Senyum, canda dan tawa mereka membuat penulis bahagia dan semangat lagi untuk menjejarkan skripsi ini.
16. Ucapan terimakasih yang tulus dari hati tercurahkan untuk kalian. Desmon Eka Chandra, Thio Sandiyuda P, Erisa Tri Anggraini, Yulia Purba Sari, Pandu Pamungkas, Triyadi Isworo, Ghali Billridho S, Abdu'rahman, Datas Jaya Melinting, Hadi Purwanto. Banyak cerita yang mungkin tak cukup tertuliskan, banyak canda tawa yang mungkin tak habis diceritakan, banyak perjalanan sedih dan pilu yang mungkin selalu terkenang, dan banyak ketidak jelasan yang tak kunjung terselesaikan
17. Ucapan spesial untuk sahabat-sahabat sepermainan dan seperjuangan **ANE 2010 ADUSELON (Angkatan ke Dua Belas Sekelompok Mahasiswa Publik Administration)**., Astria, Bunga, Enggar, Enggi, Farizal, Julyan, Dua Maya, Mona, Sari Sukma, Shela, Yogis, Ade, Anjas, Annisa, Ardi Cahya, Chandra, Corie, Dita, Dora, Fadri, Gerri, Gideon, Gusti, Helsi, Hepsa, Intan Ayu, Jenni, Karina, Lica, Samsu, Tasya, Mery, Roofi'I, Aden, Helyus, Rizal Putra, Nona, Nurul, Nuzul, Risky, Sahara, Satria, Shari, Taufiq, Loy, Yulius, Aris, Cita, Dewinta, Efridho, Firdaus, Hanny, Dua Indah, Jodi, Lusy, Maritha, Dua Nurul, Putri, Rachmani, Ratna Suminar, Rizka, Selli Mutiara, Sri Rahmawati, Sriani, Wayan. Terimakasih semuanya atas segala hal yang telah diberikan selama kita beraktualisasi diri dan berproses bersama di Jurusan Ilmu Administrasi Negara maupun diluar kampus. Semoga kita sukses semua. Amin Ya Allah.

18. Kawan-kawan ANE 2011 (Oji, Vike, Popo, Esa, Kio, Menceng, Rosyid, Fredy, Wahyu, Rio, Widi, Devin, Panggo, Toto, Sigit, Chiko, Cristy, Okta, Farah, Eki, Ratu, Feby, Silvi, Nyunyu, Novia, Pebie, Tami, Renita, Danisa, Wulan, Tria, dkk), ANE 2012 (Denish, Bery, Purnama, Serli, Satria, Pw, Ayu Septiani, Rezki, Mamat, Ihsan, Taufik, Dian, Nisul, Stefani, Novaria, Nadiril, Eko, Firdaus, Dwini, Betty, Bayu, Ikhwan, Rifki, Tripang, Novita, Anisa, Erna, Dara, Hanbul, Dilla, Emi, Irlan dkk), ANE 2013 (Rindu, Desti, Dinda, Iqbal, Galih, Hasby, Zikri, Sedi, Arinta, Arief, Uki, Ghina, Uun, Septiya, Okke, Nuris, Dewi, Jita, Meilika, Maya Sela, Dua Kartika, Fajar, Devi, Mat golok, Okta, Dhimas, Pepah, Hafiz, Leo, Balur, Sidik, Zulham, Tong Bajil, Taufik, Revardo, Ala, dkk) ANE 2014, ANE 2015
19. Saudara dan Saudari KKN Tematik 2013 (Kuliah Kerja Nyata) di Pekon Tanjung Jaya Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Indra Saputra (Hukum), Maya Utami (Fisip), Indra Kharisma (Ekonomi), Budi Raharjo (Teknik), Rizni Fitriana (Kedokteran), Lesy Gustina (Fisip), A.Citra Varika (Ekonomi), Ivana Astria Rani (Teknik), Farid Anfasa (Hukum). Terima kasih atas pengalaman berharga yang mengesankan selama 40 hari.
20. Saudara dan Saudari Organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Sulit AIR (IPPSA) Teluk Betung. Amalia, Ayu May Asyara, Afridon, Fadhil, Bang Yudi, Andi, Dayat, Taufik, Andre, Hafid, Fahmi dll. Terimakasih atas segala hal yang pernah kita rencanakan dan implementasikan semoga amal perbuatan

dan pengabdian kalian dibidang pendidikan dan didunia anak dibalas Allah SWT.

21. Kawan-kawan di Pasar Kota Karang. Nurhasanah, Bang Budi, Uni Pit, Meli Galau, Ences, Evon, Enek, Inal, Novi, Uum, Sari, Malia, Mas Yanto, Mas Pay, Pakdin, Gondil dll. Terimakasih atas waktu pagi sampe sore mengisi obrolan disaat pasar sepi.
22. Terima kasih kepada pengisi hati selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai
23. Beserta seluruh pihak yang terkait dan telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa dituliskan satu per satu.

Bandar lampung, 2 Maret 2017

Penulis,

Ali Imron

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemberdayaan Masyarakat	11
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	11
2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	16
3. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan	19
4. Pendekatan Pemberdayaan masyarakat	21
B. Karakteristik Masyarakat Pesisir	26
1. Pengertian Masyarakat Pesisir	26
2. Karakteristik Masyarakat Pesisir	28
C. Pengembangan Klaster Ikan	31
1. Pengembangan Klaster	31
2. Tujuan pengembangan klaster	32
3. Sasaran Program Pengembangan Klaster	32
D. Peranan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	46
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	47
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Masyarakat Pulau Pasaran Bandar Lampung	50
B. Aspek Sumber Daya Manusia	54
C. Aspek Permodalan	57

V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Klaster Ikan	60
B. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan di Pulau Pasaran.....	82
C. Pembahasan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Klaster Ikan	88
D. Pembahasan Kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Klaster Ikan	95
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kota Bandar Lampung tahun 2011-2013 (Ton).....	5
1.2 Data Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kota Bandar Lampung tahun 2011-2013 (Ton).....	6
3.1 Data Sekunder	43
3.2 Data Informan	44
3.3 Dokumentasi	45
3.4 Triangulasi Data	49
5.1 Fasilitas yang ada dilokasi sentra pengolahan ikan teri	63
5.2 Fasilitas yang ada pada lokasi sentra pengolahan Pulau Pasaran yang merupakan asset dari pemerintah.....	63
5.3 Kelompok disentra pengolahan ikan teri Pulau Pasaran.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Komponen-komponen dalam analisis data	48
4.1 Rantai Nilai Pengolahan Ikan Teri Kering di Pulau Pasaran	54
4.2 Tenaga Kerja Pada Rantai Pengolahan Ikan Kering	56
4.3 Proporsi Pengalaman Kemitraan Permodalan Permodalan dengan pihak Ketiga	59
5.1 Tempat perebusan ikan di Pulau Pasaran, masyarakat merebus ikan sebelum proses penjemuran dilakukan	64
5.2 Tempat penjemuran ikan di Pulau Pasaran. Nelayan memilih ikan untuk dikeringkan supaya mendapatkan hasil pengeringan yang baik	65
5.3 Pembinaan yang dilakukan fasilitator untuk menumbuhkan soliditas kelompok sehingga dapat meningkatkan rasa saling memiliki diantara kelompok	68
5.4 Pemberian pelatihan dan pendidikan motivasi kelompok yang diberikan fasilitator guna menambah pengetahuan dan kemampuan individu	69
5.5 Struktur Organisasi Koperasi Mitra Karya Bahari	70
5.6 Koperasi perikanan ISM Mitra Karya Bahari yang berada di Pulau Pasaran	71

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia merupakan realitas yang harus diterima sebagai konsekuensi dari sebuah Negara Kepulauan. Pulau-pulau kecil merupakan sebuah pulau yang memiliki karakteristik yang unik baik secara fisik maupun sosial budaya masyarakatnya. Kondisi dan karakteristik pulau-pulau kecil tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah untuk dapat mengelola secara bijak sebagai bagian dari pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan pulau-pulau kecil memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan.

Pengelolaan pulau-pulau kecil memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional karena memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun, hutan *mangrove*, perikanan dan kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. (Sumber: <http://beranda-miti.com/pendekatan->

pembangunan-berkelanjutan-sustainable-development-untuk-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-terluar-di-indonesia/, diakses tanggal 9 September 2014)

Kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Artinya pengelolaan pulau-pulau kecil harus memperhatikan keserasian dan keseimbangan sehingga pengelolaan tersebut menguntungkan secara ekonomi namun tidak merugikan secara ekologis.

Orientasi pembangunan pada masa lalu lebih difokuskan pada wilayah daratan (*mainland*) dan belum diarahkan ke wilayah laut dan pulau-pulau kecil. Masih rendahnya kesadaran, komitmen, dan *political will* dari Pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil inilah yang menjadi hambatan utama dalam pengelolaan potensi pulau-pulau kecil. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pasar, listrik, media informasi dan komunikasi menyebabkan tingkat pendidikan (kualitas SDM), tingkat kesehatan, tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat pulau-pulau kecil rendah. Pemanfaatan sumberdaya yang berlebih dan tidak ramah lingkungan yang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, belum adanya kebijakan yang

terintegrasi lintas sektor di pusat dan daerah serta rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan pulau-pulau kecil pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam hal ini, sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia, maka kewenangan pengelolaan pulau-pulau kecil diserahkan kepada daerah sepenuhnya. Berdasarkan UUD 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang ada di daerahnya dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, maka kewenangan untuk mengelola potensi sumber daya alam dikelola secara sah oleh daerah dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemberdayaan merupakan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lainnya. Sejalan dengan itu, menurut Suharto (2005:58) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki

kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya itu sendiri.

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung yang memiliki kewenangan untuk mengelola pulau-pulau kecil di daerahnya. Letak geografis Kota Bandar Lampung yang memiliki daerah pesisir dan pulau mengharuskan adanya pengelolaan secara terpadu, diantaranya adalah Pulau Kubur dan Pulau Pasaran yang berada di Kecamatan Teluk Betung Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri No. 32 Tahun 2010, Pulau Pasaran telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Pulau pasaran merupakan pulau kecil yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Pulau Pasaran telah dikenal luas sebagai salah satu wilayah penghasil ikan teri kering terbesar di Provinsi

Lampung. Sebagian besar masyarakat di Pulau Pasaran berprofesi sebagai pengolah ikan teri. Ikan teri merupakan komoditas yang relatif tersedia di Pulau Pasaran karena aktivitas nelayan yang menangkap ikan di sekitar perairan Pulau Pasaran. Produk teri kering yang menjadi prioritas pengolah terdiri dari teri nasi, teri nilon, dan teri jengki. (Sumber: <http://www.bi.go.id/umkm/lampung> diakses pada tanggal 3 Desember 2014).

Berkaitan dengan pemberdayaan, sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pemerintah menggalakkan pengembangan komoditi dengan pola OVOP/*one village one product* yang berbasis klaster. Program OVOP ini sangat cocok dilaksanakan di Pulau Pasaran mengingat produk ikan teri sudah menjadi produk utama di pulau tersebut. Usaha ini menjadi andalan sumber pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang tinggal di pulau maupun pekerja dari luar pulau. Pengembangan komoditas unggulan tersebut dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat lewat penguatan kapasitas pengembangan klaster ikan. Tujuan pemberdayaan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pengolah ikan kering di Pulau Pasaran serta meningkatnya kegiatan usaha mikro dan kecil yang dilakukan komunitas nelayan pengolah ikan kering.

Beberapa data penunjang perikanan lainnya yang disajikan dalam tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.1 Data Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kota Bandar Lampung tahun 2011-2013 (Ton)

Tahun	2011	2012	2013
Kuartal I	5.301,1	6.064,00	6.472,60
Kuartal II	5.899,8	6.462,30	6.247,80
Kuartal III	6.035,5	6.024,74	7.249,00

Kuartal IV	6.119,9	6.183,68	6.802,48
Total	23.356,30	24.734,72	26.711,88

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung (2015)

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan hasil produksi perikanan secara umum hasil tangkapan nelayan \pm 25.731.000 ton/tahun dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga potensi perikanan di Kota Bandar Lampung dari hasil tangkapan nelayan \pm sepertiganya merupakan hasil tangkapan ikan teri, sedangkan hasil tangkapan perikanan darat \pm 243.000 ton/tahun merupakan produksi ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Bandar Lampung.

Sedangkan ikan teri pulau pasaran dikenal dengan ikan teri siger, jenis ikan teri siger dan harga jual sebagai berikut:

Tabel 1.2. Data Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kota Bandar Lampung tahun 2011-2013 (Ton)

No	Jenis Teri	Kisaran Harga Jual/Kg
a.	Teri Nasi	Rp 50.000,- s/d Rp 70.000,-
b.	Teri Nilon	Rp 40.000,- s/d Rp 50.000,-
c.	Teri Jengki	Rp 30.000,- s/d Rp 40.000,-

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung (2015)

Sistem pemasaran ikan teri siger dijual dengan sistem ikan dikirim kepada tengkulak (*broker*) di muara kapuk Jakarta, sesampai di Jakarta harga beli ikan ditentukan oleh pihak *broker*, baru diinformasikan kepada pengolah ikan teri di pulau pasaran, sehingga nilai tawar bagi si pengolah tidak memiliki. Untuk transaksi jual beli ikan teri seperti ini sudah berjalan sejak memulai usaha pengolahan di Pulau Pasaran.

Pada sisi lain, potensi yang besar tersebut belum dapat terkelola dengan baik terutama dalam mengorganisasi para pengolah ikan. Pengorganisasian para pengolah ikan teri kering dalam satu wadah kelembagaan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan pola klaster. Dengan pola klaster, maka para pengolah ikan teri kering yang ada wilayah tersebut dapat saling mendukung, melengkapi serta bekerja bersama dan untuk maju bersama-sama. Dalam mencapai hal tersebut tentu diperlukan strategi dan intervensi terhadap komunitas sasaran. Dalam pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasi potensinya. Peningkatan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri komunitas itulah yang dikenal dengan penguatan kapasitas

Menurut Suharto dalam Anwas (2014:87) Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian bukan berarti mampu hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan.

Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade utilitas* dari obyek yang diberdayakan. Karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk terus

menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pengertian sehari-hari, pemberdayaan masyarakat selalu dikonotasikan sebagai pemberdayaan masyarakat kelas bawah yang umumnya dinilai tidak berdaya. Pelaksanaan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Penerapan proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, pendukung dan pemeliharaan.

Kondisi produk-produk ikan teri di Pulau Pasaran juga terkendala masalah kebersihan dan sanitasi. Hasil ikan dan kerang hijau di Pulau Pasaran belum layak produknya untuk diekspor ke luar negeri. Penyebabnya, sampah-sampah banyak berserakan, seperti plastik bekas *snack*, botol-botol, serta kayu-kayu banyak terlihat di setiap perkampungan dan di dalam laut serta tempat pengeringan teri yang kemungkinan besar terjadi kontaminasi karena banyaknya binatang, seperti kucing dan ayam, berkeliaran di area pengeringan. Selain itu, akses masuk ke Pulau juga tidak representatif lantaran jembatan yang ada hanya bisa dilalui oleh sepeda motor sehingga sulit dalam menyalurkan produk. (Sumber: <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/71741-investor-sorot-kebersihan-pulau-pasaran> diakses pada tanggal 3 Desember 2014)

Mengingat keberadaan pulau-pulau kecil yang ada sangat penting dan memiliki potensi yang baik sehingga perlu dikelola dan dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah daerah lewat SKPD terkait perlu untuk melakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai **“Pemberdayaan**

Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan (Studi pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengembangan Klaster Ikan di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung ?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah keilmuan Administrasi Negara dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan solusi bagi pemerintah daerah untuk memecahkan masalah pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Definisi pemberdayaan masyarakat sangat beragam. Menurut Suharto (2005:58) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Mardikanto dkk (2013:28) pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lainnya.

Menurut World Bank dalam Mardikanto dkk (2013:28) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
4. Terjaminnya keamanan
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Dubois dan Miley dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007:116) mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain:

1. Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit*.
2. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
3. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat memengaruhi.
4. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat daripada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan.
5. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
6. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi.
7. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Suharto (2005:58) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan

- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya itu sendiri.

Anthony Bebington dalam Mardikanto dkk (2013:30) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Dengan titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta

pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam pemberdayaan ini, upaya yang penting adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana fisik, meliputi irigasi, jalan, listrik maupun bidang sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah.

3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat dari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi Wrihatnolo dan Nugroho (2007:205), yaitu:

- a. Upaya Pemberian Kepastian

Pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat berkemampuan lemah yang dilakukan secara sengaja dan terukur. Upaya yang dilakukan secara sengaja dan terukur artinya terdapat strategi, mekanisme dan tahapan yang disusun secara sistematis untuk memberdayakan masyarakat berkemampuan lemah dalam jangka waktu tertentu

b. Upaya Pemihakan

Pemberdayaan adalah upaya memberikan pemihakan yang berjalan terpadu dengan upaya pemberian kesempatan. Upaya pemihakan utamanya dilakukan dengan cara mencegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah

c. Upaya Perlindungan

Pemberdayaan adalah melindungi yang lemah. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu akan mengerdikan yang kecil dan menglulaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Suharto (2005:68) adalah:

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat
- e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus dan evolutif
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat di atas, dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat tersebut.

Pemikiran prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Soedijanto dalam Mardikanto (2013:108):

- a. Kesukarelaan, artinya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
- b. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok maupun kelembagaan yang lain.
- c. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan dari pihak luar.
- d. Partisipatif, artinya keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.
- e. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.
- f. Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama *stakeholders*
- g. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan.

- h. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.
- i. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.
- j. Desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten atau kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya bagi kemakmuran masyarakat dan kesimbangan pembangunan.

3. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan

Menurut Kieffer dalam Suharto (2005:63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik, dan kompetensi partisipatif.

Parson *et.al.* dalam Suharto (2005:63) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.

Schuler *et.al* dalam Suharto (2005:64) mengembangkan beberapa indikator, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, yaitu:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintahan desa atau kelurahan.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan dan lain-lain.

Mardikanto (2005:291) mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan
- b. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan
- c. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan
- d. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program pengendalian
- e. Jumlah dana yang digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan
- f. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah
- g. Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
- h. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan
- i. Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang tergabung dalam klaster ikan

4. Pendekatan Pemberdayaan masyarakat

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto dalam Anwas (2014:87), penerapan proses

pemberdayaan dapat dilakukan melalui : pemungkinan, penguatan, perlindungan, pendukungan dan pemeliharaan.

a. Pemungkinan (*enabling*)

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.

b. Penguatan (*empowering*)

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan (*protecting*)

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Pendukungan (*supporting*)

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan (*foresting*)

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan bersama.

Sedangkan menurut Suharto (2005:95) pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan pendampingan sosial yang berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi, yakni: pemungkinan atau fasilitasi (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukung (*supporting*).

a. Pemungkinan atau Fasilitasi (*enabling*)

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa pekerja sosial berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi atau negoisasi, serta melakukan manajemen sumber. Program pemberdayaan masyarakat untuk penanganan masalah sosial umumnya diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber, baik karena sumber tersebut tidak ada disekitar lingkungannya, maupun karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau karena alasan ekonomi maupun birokrasi, pekerja sosial terpanggil untuk mampu memobilisasi dan mengkordinasi sumber-sumber tersebut agar dapat dijangkau oleh klien.

Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Sumber dapat berupa sumber personal (pengetahuan, motivasi, pengalam hidup), sumber interpersonal (sistem

pendukung yang lahir baik dari jaringan pertolongan alamiah maupun interaksi formal dengan orang lain), dan sumber sosial (respon kelembagaan yang mendukung kesejahteraan klien maupun masyarakat pada umumnya). Pengertian manajemen disini mencakup pengkoordinasian, pensistematisasian, dan pengintegrasian. Pengertian manajemen juga meliputi pembimbingan, kepemimpinan, dan kolaborasi dengan pengguna atau penerima program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian tugas utama petugas sosial dalam manajemen sumber adalah menghubungkan klien dengan sumber-sumber sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri klien maupun kapasitas pemecahan masalahnya.

b. Penguatan (*empowering*)

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Dalam hal ini pendampingan berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan. Sebagai fungsi dalam pendampingan sosial, pendidikan lebih menunjuk pada sebuah proses kegiatan, ketimbang sebagai sebuah hasil dari suatu kegiatan. Pendidikan sangat terkait dengan pencegahan berbagai kondisi yang dapat menghambat kepercayaan diri individu dan masyarakat, yang merupakan bentuk kerjasama antara pekerja sosial (sebagai guru dan pendamping) dengan klien (sebagai murid dan peserta

didik). Peserta didik adalah *partner* yang memiliki potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar atau pembelajaran merupakan proses saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga pekerja sosial dan klien pada hakikatnya dapat menjadi pendidik dan peserta didik sekaligus.

c. Perlindungan (*protecting*)

Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat yang didampinginya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan.

Konsultasi dilakukan sebagai bagian dari kerjasama yang saling melengkapi antara sistem klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Pekerja sosial membagi secara formal pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, sedangkan klien membagi pengalaman personal, organisasi atau kemasyarakatan yang pernah diperoleh semasa hidupnya. Dalam proses pemecahan masalah, pendampingan sosial dapat dilakukan melalui

serangkaian tahapan yang biasa dilakukan dalam praktek pekerjaan sosial pada umumnya yaitu: pemahaman kebutuhan, perencanaan dan penyeleksian program, penerapan program, evaluasi dan pengakhiran.

d. Pendukungan (*supporting*)

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2007:117) Proses pemberdayaan hendaknya *enabling* (menciptakan suasana kondusif), *empowering* (penguatan kapasitas), *protecting* (perlindungan dari ketidakadilan), *supporting* (bimbingan dan dukungan), dan *foresting* (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang). Pada gilirannya diharapkan akan terwujud kapasitas ketahanan masyarakat secara lebih bermakna, bukan sebaliknya bahwa stimulant dan proses yang ada menjebak masyarakat pada suasana yang penuh ketergantungan.

B. Karakteristik Masyarakat Pesisir

1. Pengertian Masyarakat Pesisir

Menurut Satria dalam Ikhsani (2011) masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan

memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Tentu masyarakat pesisir tidak saja nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan bahkan pedagang ikan.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian terkait langsung maupun tidak langsung, dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan, industri dan jasa maritim.

Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat pesisir adalah suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dalam sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya dan sangat beragam identitas, spesialisasi pekerjaan, derajat sosial, pendidikan serta latar belakang budayanya. Adapun berbagai tipe pekerjaan dari masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

- a. Nelayan penangkap ikan dan hewan-hewan laut lainnya
- b. Petani ikan (budidaya air payau atau tambak dan budidaya laut)
- c. Pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut

- d. Pemilik atau pekerja industri pariwisata
- e. Pemilik atau pekerja pertambangan dan energi
- f. Pemilik atau pekerja industri maritim (galangan kapal, *coastal and ocean engineering*)

2. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang direpresentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa di prediksi. Karakteristik tersebut berbeda sama sekali dengan nelayan. Nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini bersifat akses terbuka (*open access*). Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, dengan demikian resiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas dan terbuka.

Menurut Firth dalam Satria (2015:8) masyarakat nelayan memiliki kemiripan dengan masyarakat tani yakni bahwa sifat usahanya berskala kecil dengan peralatan dan organisasi pasar yang sederhana, eksploitasi yang sering berkaitan dengan masalah kerjasama, sebagian besar menyandarkan diri pada produksi yang bersifat subsistem dan memiliki keragaman dalam tingkat dan perilaku ekonominya.

Adapun berbagai aspek-aspek masyarakat pesisir adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengetahuan

Pengetahuan umumnya didapatkan dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Kuatnya pengetahuan lokal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan. Pengetahuan-pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) seperti teknik penangkapan ikan, teknik pemeliharaan sampan dan teknik selam-menyelam tersebut merupakan kekayaan intelektual mereka yang hingga kini terus dipertahankan.

2. Sistem Kepercayaan

Secara teologis, nelayan masih memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Tradisi tersebut antara lain tradisi *suwonke suhu* atau dukun-dukun dalam rangka mendapatkan keselamatan saat melaut dan memperoleh hasil tangkapan yang baik. Sistem kepercayaan hingga saat ini masih mencirikan kebudayaan nelayan. Namun dengan seiring perkembangan teologis dan meningkatnya tingkat pendidikan atau intensitas pendalaman terhadap nilai-nilai agama, upacara-upacara tersebut bagi sebagian kelompok nelayan hanyalah sebuah *ritualisme*. Maksudnya, suatu tradisi yang terus dipertahankan meskipun telah kehilangan makna sesungguhnya. Jadi, tradisi tersebut dilangsungkan hanya sebagai instrument stabilitas sosial dalam komunitas nelayan.

3. Peran Perempuan

Aktivitas ekonomi perempuan merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, tak terkecuali perempuan yang berstatus

sebagai istri nelayan. Istri nelayan umumnya selain banyak bergelut dengan urusan domestik rumah tangga juga tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi baik dalam kegiatan penangkapan di perairan dangkal, pengolahan ikan maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Menurut Pollnac dalam Satria (2015:20) pembagian kerja keluarga nelayan adalah pria menangkap ikan dan anggota keluarga yang perempuan menjual ikan hasil tangkapan tersebut. Peran perempuan ini merupakan faktor penting dalam menstabilkan ekonomi pada beberapa masyarakat penangkap ikan karena pria mungkin menangkap ikan hanya kadang-kadang sementara perempuan bekerja sepanjang tahun.

Istri nelayan pada umumnya hanya menjalankan fungsi domestik dan ekonomi, dan tidak sampai pada wilayah sosial politik. Namun sebenarnya isteri nelayan juga kreatif dalam menciptakan pranata-pranata sosial yang penting bagi stabilitas sosial pada komunitas nelayan. Hal ini tampak, misalnya pada pengajian, arisan serta simpan pinjam yang juga memiliki makna penting dalam membantu dalam mengatasi ketidakpastian penghasilan ekonomi.

4. Posisi Sosial Nelayan

Posisi sosial nelayan dalam masyarakat juga menarik dicermati secara kultural maupun struktural. Hal ini disebabkan banyak masyarakat nelayan yang memiliki status yang relatif rendah. Rendahnya posisi sosial nelayan juga diakibatkan keterasingan nelayan. Keterasingan tersebut menyebabkan masyarakat bukan nelayan tidak mengetahui lebih jauh bagaimana dunia nelayan itu serta sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan banyaknya alokasi waktu

nelayan untuk kegiatan penangkapan ikan daripada untuk bersosialisasi dengan masyarakat bukan nelayan yang memang secara geografis relatif jauh dari pantai.

Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

C. Pengembangan Klaster Ikan

1. Pengembangan Klaster

Menurut Bank Indonesia (2015:13) klaster adalah sekelompok perusahaan dan lembaga terkait yang berdekatan secara geografis, memiliki kemiripan yang mendorong kompetisi bersifat komplementer. Kedekatan produk dari perusahaan-perusahaan ini pada tahap awal memacu kompetisi yang mendorong adanya spesialisasi, peningkatan kualitas, serta mendorong inovasi dalam diferensiasi pasar. Klaster disebabkan oleh keunggulan daya saing, sejarah dan institusi. Keunggulan daya saing berkaitan dengan faktor yang berhubungan dengan kondisi penawaran dan permintaan, hubungan industri dan persaingan lokal yang memberikan keuntungan bagi perusahaan lokal. Sejarah, berkaitan dengan faktor yang mendasari industri atau penggunaan teknologi yang menyebabkan keunggulan kompetitif. Institusi adalah kelembagaan formal dan informal yang mempengaruhi pengembangan klaster guna mendukung kreasi, difusi, dan pengetahuan.

2. Tujuan pengembangan klaster

Tujuan pelaksanaan program pengembangan lembaga lokal dalam rangka mewujudkan klaster modern, antara lain:

- a. Menumbuhkan soliditas kelompok sehingga dapat meningkatkan interaksi antar aktor pembentuk klaster yang mengarah pada rasa saling memiliki diantara kelompok
- b. Mewujudkan kelompok pengolah ikan teri kering yang mempunyai kemandirian dalam aspek permodalan maupun pemasaran
- c. Mengembangkan keterampilan pengolah untuk membuat produk turunan ikan teri higienis sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk ikan teri kering
- d. Memfasilitasi penguatan jalur distribusi dan pemasaran produk ikan teri kering beserta produk turunannya
- e. Memfasilitasi perluasan jaringan pengolahan ikan kering dari subsistem dari hulu sampai hilir
- f. Mengembangkan sinergi positif antar unit usaha sehingga dapat menciptakan *positioning* kualitas ikan kering khas pulau pasaran yang menjadi trigger terwujudnya *demand condition* yang *sustainable*.

3. Sasaran Program Pengembangan Klaster

Sasaran atau *output* yang diharapkan dalam pelaksanaan program pengembangan klaster antara lain:

- a. Terbentuknya kelompok pengolah ikan teri kering yang solid dan mandiri sehingga dapat meningkatkan daya tawar dalam rangka menghadapi *end user*

- b. Terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro dengan fasilitasi kelompok yang solid
- c. Terbentuknya kelompok pengolah ikan teri kering yang terampil dalam membuat produk turunan sehingga meningkatkan nilai tambah
- d. Terbentuknya sistem distribusi dan pemasaran ikan teri kering beserta produk turunannya yang dikelola oleh kelompok secara solid
- e. Terwujudnya jaringan pengolahan ikan teri kering yang solid dari subsistem hulu sampai hilir
- f. Terwujudnya unit usaha dengan positioning produk ikan teri kering yang berdaya saing (*competitiveness*) tinggi karena adanya *demand condition* produk yang berkelanjutan.

D. Peranan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Sutrisno dalam Modim (2012:20) menyatakan bahwa kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.

Menurut Muflich dalam Modim (2012:20), fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan

diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam. Dengan berbagai interpretasi yang bervariasi, saat ini hampir semua departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagaimana terefleksi dalam renstranya masing-masing. Demikian juga di daerah, hampir semua dinas/instansi juga memiliki program yang serupa. Beberapa daerah bahkan membentuk unit kerja otonom untuk mengawal proses koordinasi yang lebih baik dan menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dibawah gubernur/bupati/walikota yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam dinamika pengembangannya, tidak luput dari peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Banyak program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah melalui Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen seperti PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PENP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain sebagainya. Program-program tersebut diyakini sebagai salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian masyarakat. Dari sekian banyak program yang digulirkan, sebagian besar mengarah pada aspek kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan arah pemberdayaan masyarakat guna melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan

keterbelakangan. Pemberdayaan dalam dimensi ekonomi seperti ini dimaknai sebagai akses masyarakat atas sumber pendapatan untuk hidup layak. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna yakni melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemerintah tentunya memiliki peranan penting sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisor) dan fasilitator dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui UKM.

Puspito dalam Modim (2012:22) mengungkapkan pengertian peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tujuan) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Jadi, peranan merupakan suatu konsep yang berisikan arah yang akan ditinjau seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan. Sedangkan menurut Soekanto dalam Modim (2012:22) mengaitkan antara peranan dan kedudukan dimana suatu kegiatan baru dapat disebut suatu peranan jika telah melaksanakan semua yang berkenaan dengan hak dan kewajibannya.

Lambolo (2010:32) menyatakan bahwa arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan

emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat diperlukan. Rasyid dalam Lambolo (2010:32) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation).

Lambolo (2010:36) mengatakan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan.

Ndraha dalam Lambolo (2010:36) menyebutkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan. Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya

masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan) ke steering (pengendalian). Fungsi sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring dengan itu, hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka secara perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi kebutuhannya.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar

kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang artinya menggambarkan suatu keadaan dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2011: 98) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini berupaya menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan dengan mengungkap fenomena lapangan yang bersifat empiris yang menggunakan kata-kata untuk menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian.

Melalui model penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, maka peneliti akan memperoleh penjelasan dan gambaran atas pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan (studi pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung).

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini mempunyai fokus dari turunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan kluster ikan dianalisis dengan proses pendekatan menurut Suharto yaitu :
 - a. Pemungkinan atau fasilitasi (*Enabling*) dengan melihat pemanfaatan sumber-sumber yang ada baik berupa personal, sumber sosial, maupun sumber interpersonal.
 - b. Penguatan kapasitas (*Empowering*) dengan melihat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
 - c. Pendukung (*Supporting*) dengan melihat kerjasama antara fasilitator dan lembaga eksternal lainnya.
 - d. Pemeliharaan (*Foresting*) dengan melihat respon atau tanggapan masyarakat terhadap kegiatan tersebut dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan
2. Kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan kelembagaan kluster :
 - a. Kendala Internal
 - b. Kendala Eksternal

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena Pulau Pasaran merupakan pulau kecil yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Pulau Pasaran telah di kenal luas sebagai salah satu wilayah penghasil ikan teri kering terbesar di Provinsi Lampung. Pulau Pasaran juga merupakan pulau yang melaksanakan Program OVOP/ *One Village One Product* yang berbasis klaster. Usaha ini menjadi andalan sumber pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang tinggal di pulau maupun pekerja dari luar pulau Pasaran Kota Bandar Lampung.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data merupakan bentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian. Data penelitian terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperlukan peneliti. Data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai hasil pengumpulan yang dilakukan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi mengenai

Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan (studi pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang didapat. Data sekunder bukan data yang didapat langsung oleh peneliti, melainkan telah melalui tangan kedua dan seterusnya. Data sekunder dapat berupa draf, notulensi, naskah, dokumen resmi, dan sebagainya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan (studi pada masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung)

Tabel 3.1
Data Sekunder

No	Jenis Data Sekunder	Data Sekunder
1	Buku-buku	Buku Pedoman Pengembangan Klaster Ikan Teri di Pulau Pasaran
2	Dokumentasi	a. Foto Tempat Perebusan Ikan di Pulau Pasaran b. Foto Tempat Penjemuran Ikan di Pulau Pasaran\ c. Foto Pembinaan yang dilakukan Fasilitator kepada kelompok sasaran d. Foto Pemberian Pelatihan Motivasi kepada elompok sasaran
3	Data-data	a. Data Rantai Nilai Pengolahan Ikan Teri Kering b. Data Tenaga kerja Pada Rantai Pengolahan Ikan Kering c. Data Proporsi Pengalaman Kemitraan Permodalan dengan Pihak Ketiga d. Data Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2013 (Mengenai Hasil Tangkapan) e. Data Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2013 (Mengenai Kisaran Harga Jual) f. Data Fasilitas yang ada di lokasi sentra Pengolahan Ikan Teri g. Data Fasilitas yang ada di sentra Pengolahan di Pulau Pasaran yang merupakan aset pemerintah h. Struktur Organisasi Koperasi Mitra Karya Bahari i. Data Kelompok di sentra Pengolahan Ikan Teri Pulau Pasaran
4	Website	a. http://beranda-miti.com/pendekatan-pembangunan-berkelanjutan-sustainable-development-untuk-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-terluar-di-indonesia/ b. http://www.bi.go.id/umkm/lampung c. http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/71741-investor-sorot-kebersihan-pulau-pasaran

Sumber : Diolah oleh Peneliti 2016

2. Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang di dapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian.

a. Informan

Sumber data ini merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan (studi pada Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung) Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.2
Data Informan

No	Sumber Informan	Jabatan	Waktu Pelaksanaan
1	Bapak Andi Danata, S.P, M.SI	Konsultan Bank Indonesia	22 Oktober 2015
2	Ibu Ismalia, S.E, M.M	Kasi Sarana dan Prasarana Pengeolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung	5 November 2015
3	Bapak Rosidin	Ketua kelompok KUB Welas Asih Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung	22 Oktober 2015
4	Bapak Subur	Sekretaris Koperasi Perikanan Mitra Karya Bahari Kota Bandar Lampung	29 Oktober 2015
5	Bapak Toto Heriyanto	Masyarakat Pulau Pasaran	06 Oktober 2015
6	Bapak H. Warzana	Masyarakat Pulau Pasaran	15 Oktober 2015

Sumber : Diolah oleh peneliti 2016

b. Dokumen-Dokumen

Dokumen-dokumen yang digunakan merupakan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari berbagai sumber meliputi: Undang-undang, Peraturan Daerah, catatan-catatan, arsip-arsip, foto dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan (studi pada masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung)

Tabel 3.3
Dokumentasi

No	Dokumen	Subtansi
1	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kewenangan pengelolaan pulau-pulau kecil
2	Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2010 tentang ditunjuknya 7 (tujuh) wilayah di Provinsi Lampung dalam pengembangan program minapolitan	Peraturan pengembangan program minapolitan
3	Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 197/ IV.35/HK/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Klaster Pengolahan Ikan Kering di Pulau Pasaran	Peraturan Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Klaster Pengolahan Ikan Kering di Pulau Pasaran
4	Keputusan Dirjen P2HP Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor. KEP.76/DJ-P2HP/2012	Peraturan Tim Teknis Pembina Sentra Pengolahan Hasil Perikanan

Sumber : diolah oleh peneliti 2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:62) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat menyurat, dan lain sebagainya. Sumber data ini, merupakan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan.

c. Observasi

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana kegiatan itu terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan yang meliputi:

- a. Penyuluhan-penyuluhan oleh Bank Indonesia selaku fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan klaster ikan
- b. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
- c. Pendirian Koperasi Mitra Karya Bahari

- d. Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelompok binaan

F. Teknik Analisis Data

Data-data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung. Setelah data terkumpul kemudian hal yang dilakukan adalah menganalisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) teknik analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pemilihan data wawancara, dokumentasi dan observasi yang telah didapat di lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian untuk dapat disajikan dalam penyajian data.

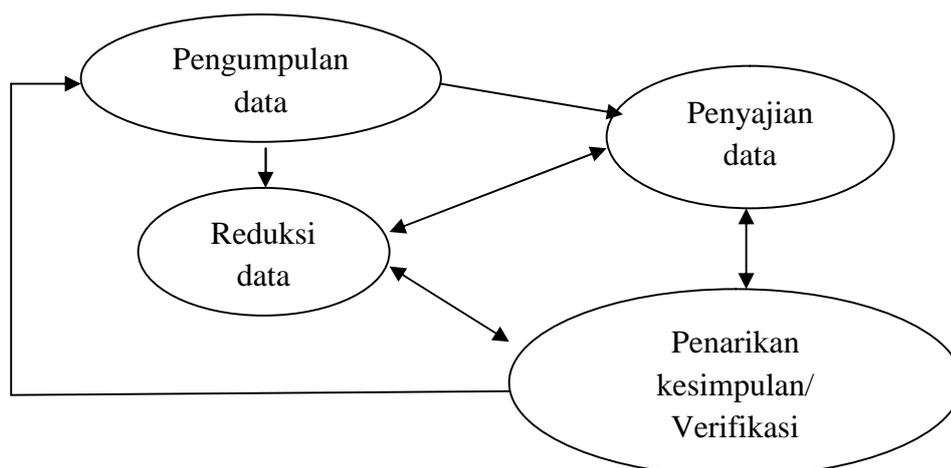
2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusoin Drawing*)

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.



Gambar 3.1 : Komponen-komponen dalam analisis data
 Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:247)

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2011:326-327) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria :

1. Teknik memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan)

a. Triangulasi

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari Konsultan Bank Indonesia, Kasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Sekretaris Koperasi Perikanan Mitra Karya Bahari, Ketua kelompok KUB Welas Asih Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung dan Masyarakat di Pulau Pasaran. Setelah dilakukan wawancara peneliti memasukan hasil wawancara ke dalam tabel triangulasi data (terlampir) yang digunakan sebagai panduan dalam pembahasan isi skripsi.

Tabel 3.4
Triangulasi Data

Pemungkinan atau fasilitasi (*Enabling*)

Informan	Data Hasil Interview	Kategori Inti
Andi Danata, selaku Konsultan Bank Indonesia	Mengenai pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran, kami selaku fasilitator telah melakukan penyuluhan-penyuluhan secara rutin terkait pemberdayaan masyarakat di Pulau Pasaran	Telah dilakukan penyuluhan-penyuluhan oleh Bank Indonesia selaku fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan klaster ikan

Sumber : Diolah oleh peneliti 2016

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Pada penelitian ini digunakan hasil wawancara dan

observasi yang peneliti lakukan untuk membandingkan dengan kajian teori yang ada

2. Teknik Memeriksa Keteralihan Data

Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan

Peneliti perlu menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses yang digunakan

4. Kepastian Data (*confirmability*)

Kepastian Data (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Pulau Pasaran Bandar Lampung

Secara geografis sentra pengolahan yang ada di Kota Bandar Lampung pada umumnya terletak di sepanjang pantai dan Pulau Pasaran, yaitu pada Kecamatan Panjang, Kecamatan Bumiwaras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, dan Kecamatan Teluk Betung Timur. Sebagai lokus sentra pengolahan ikan teri yang terbesar di Provinsi Lampung adalah sentra pengolahan ikan teri Pulau Pasaran yang berlokasi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur.

Pulau Pasaran telah dikenal luas sebagai salah satu wilayah penghasil ikan teri terbesar di Provinsi Lampung. Produk ikan teri yang menjadi prioritas pengolah adalah ikan jenis teri yang terdiri dari teri nasi, teri nilon, dan teri jengki. Namun selain itu pengolah juga mengusahakan ikan kering jenis lainnya, seperti ikan tanjan, cumi, tembang dan bingseng, dan lain-lain. Produk teri nasi di Pulau Pasaran ini mempunyai potensi ekspor yang cukup besar karena dalam satu siklus produksi dapat menghasilkan ± 20 ton teri kering. Disamping itu ketersediaan bahan baku selalu terjaga karena ikan teri tergolong sebagai makhluk hidup dengan tingkat regenerasi yang tinggi dan didukung oleh wilayah penangkapan ikan yaitu di Teluk Lampung yang tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan angin musim.

Pulau Pasaran mempunyai keunikan tersendiri karena letaknya yang sangat dekat sekali dengan daratan tepatnya kecamatan Teluk Betung Timur dengan jarak sekitar ± 500 m dari tepi pantai Kota Bandar Lampung yang dapat ditempuh dengan perahu kurang lebih selama 5 menit. Luas pulau ini mencapai ± 12 Ha dengan jumlah penghuni sebanyak 254 KK dan 1.158 jiwa. Hampir seluruh penghuninya bermata pencaharian sebagai pekerja/pengolah ikan kering dari hulu sampai hilir yang telah dilakukan secara turun temurun. Penghuni Pulau Pasaran pada umumnya telah menekuni usaha dibidang pengolahan ikan selama ± 50 tahun, sehingga meskipun dengan menggunakan peralatan sederhana mereka dapat menghasilkan ikan teri kering dengan kualitas yang bagus.

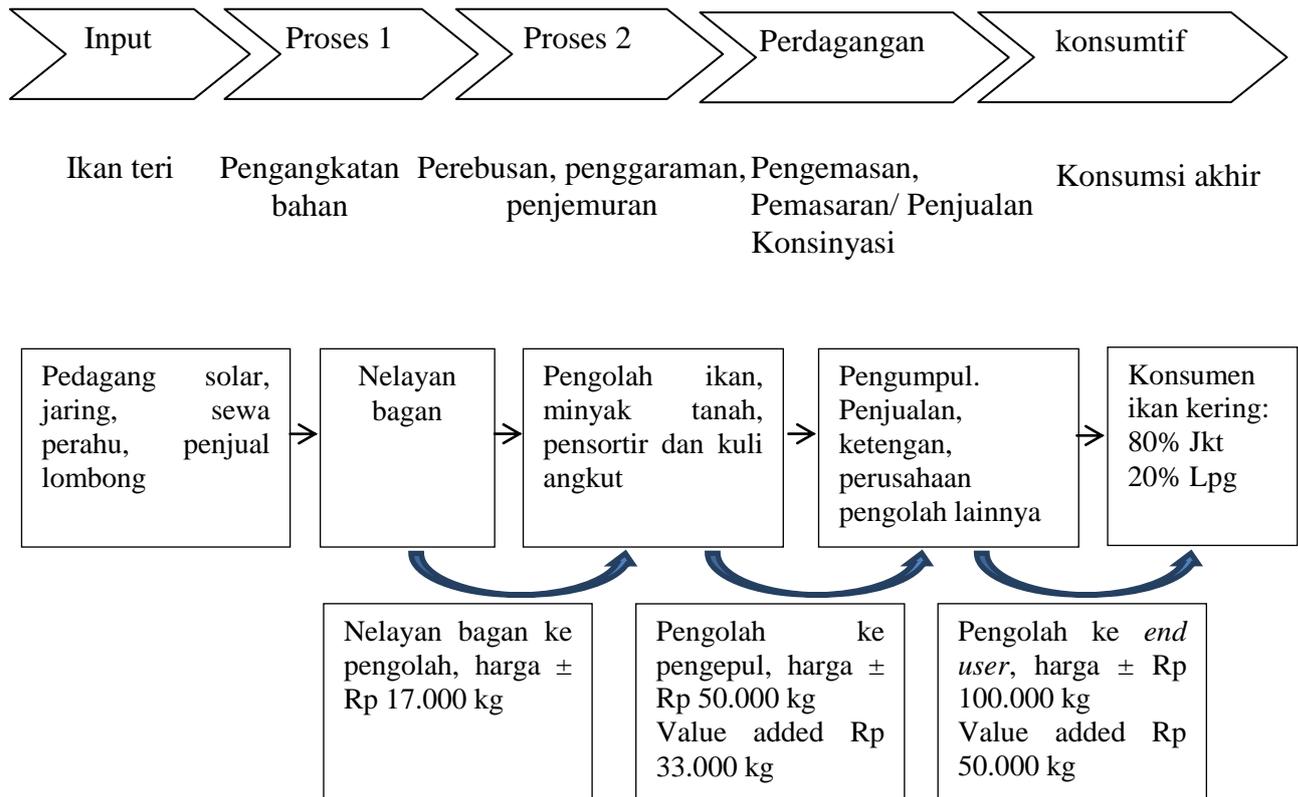
Selain mempunyai kapasitas produksi yang potensial menembus pasar ekspor, usaha pengolahan ikan kering pulau pasaran juga menyerap tenaga kerja dari luar pulau yang sebagian besar bekerja sebagai buruh pensortir ikan selama proses penjemuran.

Karakteristik masyarakat nelayan Pulau Pasaran berasal dari Indramayu, Cirebon, Berebes dan Makasar. Karakteristik ini bahwa sebagian besar nelayan dan pengolah ikan kering sudah terbiasa dengan aktivitas disektor perikanan. Masyarakat Pulau Pasaran juga memiliki ikatan keluarga yang secara sosial terhubung dengan ikatan darah. Ikatan keluarga ini turut membentuk struktur interaksi dalam masyarakat yang saling berdekatan. Hampir seluruh penghuninya bermatapencarian sebagai pekerja atau pengolah ikan kering dari hulu sampai hilir yang telah dilakukan secara turun-temurun. Dengan adanya industri pengolahan ikan kering yang terintegrasi dalam satu kawasan tersebut maka sangat potensial

untuk dikembangkan dengan pola klaster atau yang populer disebut *One Village, One Product (OVOP)*.

Seiring dengan meningkatnya taraf hidup penduduk, upaya reklamasi di sepanjang garis pantai Pulau Pasaran semakin marak dilakukan oleh penduduk asli maupun pendatang, sehingga luas Pulau Pasaran saat ini telah mencapai ± 12 ha. Jarak antara pulau dengan daratan sekitar 500 meter, yang dapat ditempuh selama 5 menit melalui jembatan penyebarangan. Sebelum jembatan penyebarangan diresmikan pada tahun 2014, masyarakat maupun para pendatang yang akan membeli hasil olahan ikan teri menggunakan perahu dari Dermaga Cungkeng dengan waktu tempuh selama 20 menit.

Berdasarkan survei yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (2010), jenis profesi usaha masyarakat pulau sebagian besar adalah pengolah ikan sebanyak 39 (73,58%) orang yang berprofesi sebagai pengolah aktif. Selain itu juga terdapat profesi sebagai pedagang pengumpul sebanyak 5 (9,43%) orang. Disamping itu terdapat profesi lainnya sebanyak 8 responden dengan rincian 2 orang sebagai pengolah dengan usaha sampingan yaitu pembuatan jaring ikan dan penjual solar. Sedangkan 6 orang lainnya berprofesi sebagai perebus ikan di Laut, perebus ikan di darat, penjual kardus, dan penjual minyak tanah dan solar. Usaha pengolahan ikan teri kering di Pulau Pasaran melibatkan beberapa unit usaha lain, misalnya nelayan bagan pada subsistem hulu dan pedagang pengumpul pada subsistem hilir. Secara rinci model hubungan klaster pengolahan ikan teri kering dari hulu sampai hilir diilustrasikan analisis rantai nilai sebagaimana pada gambar.



Gambar 4.1 Rantai Nilai Pengolahan Ikan Teri Kering di Pulau Pasaran

Sumber: Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (2010)

Selanjutnya hasil survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (2010) diperoleh informasi sebanyak 25 (64,10%) pengolah ikan teri kering dari total pengolah di Pulau Pasaran rata-rata telah menekuni usaha tersebut lebih dari 15 tahun. Pengolah ikan di Pulau Pasaran yang terlama adalah 40 tahun dan paling baru adalah 2 tahun. Paling banyak (modus) pengolah ikan telah melakukan usahanya selama 20 tahun sebanyak 8 pengolah. Aspek lama usaha dapat mencerminkan bahwa pengolah telah mempunyai keahlian dalam pengolahan ikan kering sehingga dapat dikategorikan sebagai usaha yang *feasible*.

Permasalahan umum yang dihadapi pengolah dalam kegiatan usahanya adalah persaingan perolehan bahan baku di bagan, hal ini dikarenakan masyarakat masih belum mempunyai kelembagaan yang kuat untuk bersama-sama menentukan harga. Selain itu pada subsistem hilir pengolah mempunyai kebiasaan menjual produknya dalam bentuk ikan teri kering mentah yang dikirim kepada pengumpul di Jakarta dengan sistem kepercayaan. Saluran pemasaran tunggal tersebut dimanfaatkan oleh pengumpul untuk mengambil margin keuntungan sebesar-besarnya melalui penentuan harga secara sepihak. Hal ini mengakibatkan pengolah sering mengalami kerugian karena harus menutup biaya operasional dalam mencari ikan di bagan.

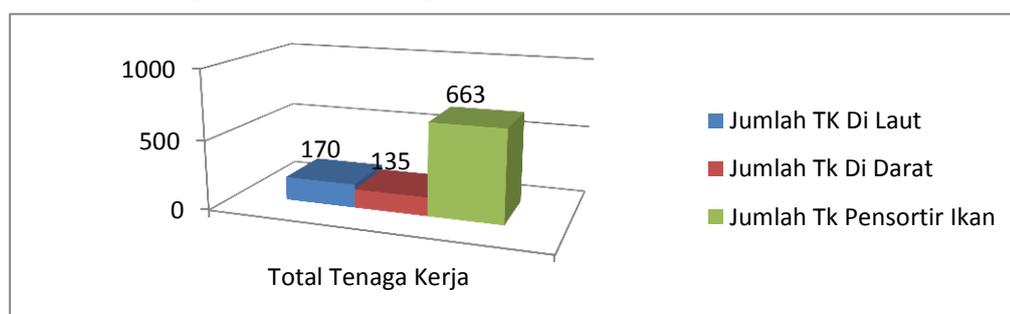
B. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dibutuhkan pada kegiatan pengolahan ikan teri kering dari hulu sampai hilir dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu :

- a. Tenaga kerja di laut yaitu tenaga kerja yang mencari ikan di bagan yang meliputi nahkoda kapal, tenaga perebus ikan di kapal dan anak buah kapal (ABK).
- b. Tenaga kerja di darat yaitu tenaga kerja yang tugasnya menghamparkan ikan hasil rebusan di kapal untuk kemudian dijemur sampai pada proses *packing* untuk dikirim ke pengumpul di Jakarta atau dijual di pasar lokal Lampung.
- c. Tenaga kerja pensortir ikan yaitu tenaga kerja yang tugasnya memisahkan ikan kering berdasarkan jenis ikan sehingga ikan dapat seragam sebelum dipasarkan.

Nelayan di Pulau Pasaran terbagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari:

- a. Nelayan bagan adalah nelayan yang menyediakan bahan baku ikan kepada pengolah. Nelayan bagan tidak mendaratkan hasil tangkapannya karena alasan efisiensi, sehingga Nelayan bagan menunggu pengolah yang akan datang untuk membeli bahan baku ikan segar dengan harga yang telah ditetapkan oleh nelayan bagan itu sendiri. Hal inilah yang sering menjadi konflik antara pengolah dan nelayan bagan karena posisi tawar pengolah yang tidak diperhitungkan dalam rantai nilai.
- b. Pengolah ikan teri adalah individu yang memberikan nilai tambah terhadap ikan teri segar menjadi produk olahan ikan. Kelompok pengolah terdiri dari 6 kelompok, yaitu 5 kelompok pengolah ikan teri kering dan 1 pengolah produk turunan ikan teri. Setiap kelompok memiliki anggota 6-10 orang dengan 1 ketua kelompok yang diharapkan dapat menjadi forum komunikasi antar pengolah. Peran ketua kelompok pengolah yang memfasilitasi aspirasi pengolah kepada pihak pemerintah, perbankan, maupun antar kelompok pengolah. Masing-masing anggota kelompok pengolah ikan teri memiliki peran dalam membuka saluran pemasaran, karena sistem penjualan hasilolahan langsung dikirim oleh individu pengolah ke pengumpul tanpa bantuan ataupun fasilitasi dari pihak intermediasi.



Gambar 4.2 Tenaga Kerja Pada Rantai Pengolahan Ikan Kering

Sumber: Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (2010)

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi Lampung (2010) sebagaimana Grafik, diperoleh informasi bahwa aktivitas yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam rantai pengolahan ikan kering adalah pada kegiatan pensortiran ikan kering. Jumlah tenaga pensortir yang dibutuhkan oleh 39 pengolah mencapai 663 tenaga kerja dan hampir seluruhnya berasal dari luar Pulau Pasaran, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha (*business process*) pengolahan ikan kering ini sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar pulau. Kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencari ikan di bagan sekaligus melakukan perebusan ikan di kapal untuk 39 pengolah sebanyak 170 tenaga kerja. Tenaga kerja yang bertugas di darat untuk menghamparkan sampai *packing* ikan dalam kardus untuk 39 pengolah yaitu sebanyak 135 tenaga kerja.

Pada umumnya nelayan Pulau Pasaran banyak menggunakan payang dan bagan perahu sebagai sarana alat tangkap ikan. Nelayan payang yang langsung mengantarkan hasil tangkapan ke pengolah. Biasanya pelanggan nelayan payang adalah pengolah yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli ikan di tengah laut. Kualitas ikan yang ditawarkan oleh nelayan payang pun sangat jauh berbeda dengan bagan perahu. Ikan teri yang sudah diperlakukan dengan es menyebabkan bobot ikan bertambah dan kesegaran ikan sudah berkurang. Selain itu terdapat nelayan menggunakan bagan perahu (congkel) sebagai alat penangkap ikan. Bagan perahu memiliki kelebihan dalam hal mobilitas dan hasil tangkapan, namun membutuhkan bahan bakar solar yang tidak sedikit. Biasanya nelayan yang menggunakan bagan jenis ini bekerja sama dengan pemilik kapal yang bermodal besar. Selain itu, terdapat juga jenis bagan tancap dan bagan apung yang

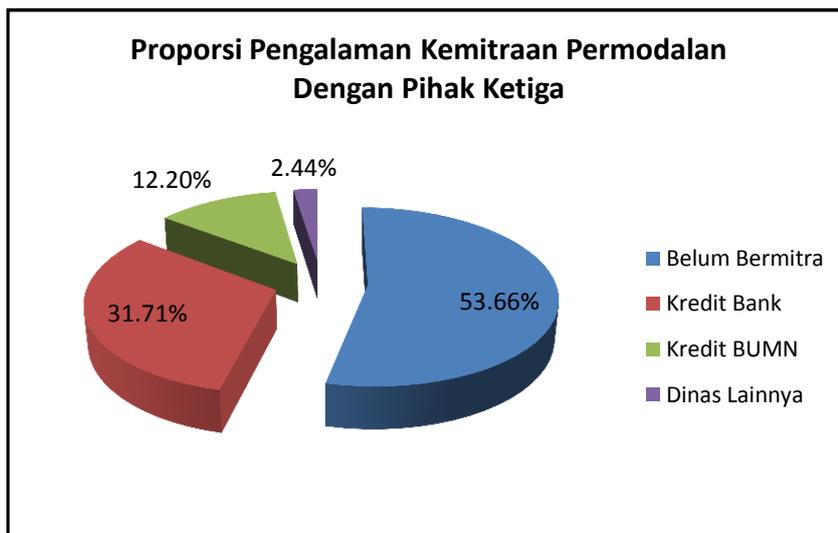
mobilitasnya rendah dan terbatas pada jenis ikan teri tertentu saja. Kedua jenis nelayan bagan ini biasanya menghabiskan waktu sekitar 25-30 hari di tengah laut untuk mendapatkan hasil tangkapan. Hal yang berlawanan terlihat pada nelayan bagan perahu (congkel) yang menangkap ikan dalam siklus waktu semalaman.

C. Aspek Permodalan

Secara umum sumber modal yang diperoleh pengolah ikan teri di Pulau Pasaran dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu ;

- a. Modal sendiri
- b. Modal dari perbankan,
- c. Bantuan modal dari pengumpul,
- d. Bantuan modal dari BUMN.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi Lampung (2010) sebagaimana dapat diperoleh informasi bahwa sumber pembiayaan dari pihak ketiga pada usaha pengolahan ikan teri kering di Pulau Pasaran ini berasal dari kredit perbankan, BUMN dan dinas Lainnya. Dinas yang mempunyai program bantuan modal yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung. Realisasi penyaluran dari keempat elemen *stakeholders* tersebut mencapai Rp386,000,000.00 yang terbagi secara merata untuk pengolah besar dan kecil. Namun dalam proses pengembaliannya mengalami kemacetan sehingga perbankan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada pengolah.



Grafik 4.3

Proporsi Pengalaman Kemitraan Permodalan Permodalan dengan pihak Ketiga
 Sumber: Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (2010)

Secara umum banyak pengolah yang belum pernah berhubungan dengan perbankan, hal ini dikarenakan pengolah enggan untuk menghadapi prosedur perbankan yang terkesan rumit dan adanya penagihan setelah kredit tersebut dicairkan. Penerapan konsep klaster diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengolah untuk melakukan akses kepada perbankan sekaligus melakukan pemberdayaan sehingga unit usaha dapat layak (*feasible* dan *bankable*) sehingga dapat melunasi kewajiban pembiayaan yang diterima. Pemasaran ikan teri siger telah menyebar keluar daerah provinsi lampung, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Palembang, Bengkulu, dan Padang, melalui tengkulak yang telah lama terbina dengan pengolah ikan teri siger, dalam hal ini mata rantainya telah terbentuk. Sehingga nilai tawar dalam pemasaran dikendalikan oleh tengkulak

Sentra Pengolahan Ikan Teri Pulau Pasaran merupakan produk unggulan Kota Bandar Lampung dan merupakan potensi yang cukup besar, maka dibentuk suatu

klaster pengolahan ikan teri dalam rangka mencapai program pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan visi sentra produk ikan olahan tahun 2012 s.d tahun 2025. Salah satu komitmen pemerintah daerah menjadikan Sentra Pengolahan Ikan Teri Pulau Pasaran sebagai Industri Pengolahan Ikan Berbasis Wisata.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan yang berada di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Fasilitator dapat memfasilitasi masyarakat dengan memobilisasi dan mengkoordinasikan sumber-sumber yang ada agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Sumber personal, sumber interpersonal, sumber sosial. Fasilitator telah memfasilitasi dengan memberikan sarana dan prasarana terkait pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung.
 - b. Fasilitator melalui pendampingan koperasi Mitra Karya Bahari di Pulau Pasaran, dengan melakukan penguatan kapasitas SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu, juga melakukan penguatan kelembagaan koperasi sebagai upaya penyadaran masyarakat

Pulau Pasaran agar termotivasi untuk berkelompok yang akhirnya mempunyai kesamaan visi dan misi dalam pencapaian kesejahteraan bersama melalui pembentukan unit usaha bersama. Penguatan dilakukan ketika ada fasilitator saja namun ketika fasilitator sudah keluar (*phasing out*) dari pengembangan klaster ini maka masyarakat Pulau Pasaran kembali kepada kegiatan semula.

- c. Bank Indonesia selaku fasilitator melakukan kerjasama dengan lembaga eksternal seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA Kota Bandar Lampung dan *stakeholders* untuk mendukung pengembangan klaster ikan, diantaranya dengan melakukan penyuluhan, pembinaan, dan pembangunan beberapa fasilitas umum di Pulau Pasaran terkait pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran.
 - d. Apa yang dilakukan fasilitator dalam program ini adalah melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat Pulau Pasaran, dan tidak ada upaya yang bersifat pemeliharaan atas berjalannya program pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran ini ke depannya.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung yaitu :
- a. Sulitnya merubah pola pikir dan paradigma komunitas sasaran
Komunitas pendampingan secara umum masih berpikir secara instan dimana setiap ada kegiatan program pada dasarnya harus memberikan keuntungan finansial buat mereka. Selain itu, peningkatan kapasitas

melalui pelatihan dan pendampingan sebagai salah satu proses penyadaran bagi komunitas masih dianggap tidak penting.

b. Adanya keterbatasan dana.

Proses pemberdayaan dalam pengembangan klaster ikan yang membutuhkan banyak dana, tidak sejalan dengan ketersediaan dana yang ada. Hal ini karena adanya keterbatasan dana dari pihak fasilitator, ditambah dengan minimnya kemampuan masyarakat dalam menghasilkan sokongan dana

c. Tingkat pendidikan yang rendah

Tingkat pendidikan yang rendah ini sangat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat pesisir dikarenakan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tingkat pulau pasaran ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam memahami pengetahuan terkait penyuluhan pengembangan klaster yang diberikan oleh fasilitator

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Fasilitator hendaknya memperluas fokus penyuluhan yang mereka berikan, tidak hanya monoton pada pelaksanaan program, tetapi juga pada upaya untuk merubah pola pikir dan paradigma sebagian masyarakat yang partisipasinya terhadap program ini masih rendah.
2. Fasilitator perlu mengupayakan/memfasilitasi penghimpunan modal koperasi dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat secara merata dan

berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menumbuhkembangkan kluster-kluster usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat lainnya khususnya pada sektor riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga kedepannya masyarakat tidak akan terus bergantung pada fasilitator.

3. Pihak fasilitator dan masyarakat Pulau Pasaran, masing-masing pihak hendaknya memiliki kesadaran diri dan komitmen yang kuat untuk menjalankan pengembangan kluster ikan ini.
4. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan pengalokasian anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat agar pemberdayaan dapat terealisasi secara merata dan menyeluruh
5. Meningkatkan pelatihan, pendampingan dan pemberian motivasi kepada kelompok masyarakat secara berkelanjutan
6. Meningkatkan dukungan *stakeholders* kepada Pulau Pasaran sebagai kluster ikan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta
- Ikhsani, Fandi Winna. 2011. *Optimasi Pengelolaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Kerapu Macan Pada Kelompok Sea Farming Di Pulau Panggang Kabupaten Administratif Kepulauan*. Bogor
- Lambolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Modim, Hi. Masita. 2012. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat)*, Skripsi: Universitas Hasanuddin
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Aditama.
- Wrihatnolo, Randy dan Nugroho, Riant.D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Website

<http://beranda-miti.com/pendekatan-pembangunan-berkelanjutan-sustainable-development-untuk-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-terluar-di-indonesia/>, (diakses tanggal 9 September 2014 Pukul 20.00 wib)

<http://www.bi.go.id/umkm/lampung> (diakses pada tanggal 3 Desember 2014 Pukul 19.00 wib)

<http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/71741-investor-sorot-kebersihan-pulau-pasaran> (diakses pada tanggal 3 Desember 2014 Pukul 13.00 wib)

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan

Sumber Lain

Buku Pedoman Pengembangan Klaster di Pulau Pasaran